

Transformasi Nilai Sistem Matrilineal Minangkabau dalam Penempatan Masyarakat Minang di Negeri Sembilan, Malaysia

The Transformation of Cultural Values in Minangkabau Matrilineal System among Minang Settlement in Negeri Sembilan, Malaysia.

HERMAYULIS, HERNADEWITA & FRENGKI HARDIAN

ABSTRAK

Pull and push factor migrasi telah menimbulkan penempatan baru suku bangsa Minangkabau yang diyakini ditemukan di Pulau Sumatera yang semenjak tahun 1945 termasuk wilayah Republik Indonesia. Migrasi merupakan pilihan hidup dengan konsekuensi-konsekuensi yang mesti dihadapi. Di antara konsekuensi itu adalah terjadinya transformasi nilai-nilai di daerah asal di penempatan baru. Bila tidak ada transformasi nilai, maka nilai tersebut akan terbenam dan akan tinggal menjadi sejarah bila hal itu digali oleh generasi yang akan datang. Persoalan yang dihadapi adalah generasi yang tidak mewarisi nilai-nilai budayanya akan menjadi generasi yang tercerabut dari akar budayanya. Akibat lanjutnya adalah akan timbul generasi yang kehilangan identitas. Untuk itu tulisan ini mengemukakan bagaimana transformasi nilai-nilai pada sistem kekerabatan Minangkabau yang menjadi identitas bagi masyarakat pendukung adat Perpatih di Negeri Sembilan mengalami transformasi dan melalui proses akulturasi, sosialisasi dan enkulturasi. Tulisan ini diangkat dari melakukan kajian melalui pengamatan dan diskusi-diskusi dengan masyarakat di Negeri Sembilan. Daripada kajian ini diketahui bahawa Adat Perpatih diakui dan diupayakan untuk tetap dipertahankan sebagai identitas masyarakat di Kerajaan Negeri Sembilan. Upaya untuk mengekalkan Adat Perpatih diupayakan dengan berbagai cara, di antaranya melalui diskusi-diskusi, tulisan-tulisan, pada berbagai upacara adat, pada acara-acara penting seperti dalam upacara perkahwinan dan ada juga dengan tetap membina tali kekerabatan dengan kerabat di daerah asal walaupun sudah berbeda kewarganegaraan. Daripada kajian ini juga ditemukan bahawa migrasi menyebabkan terjadinya perubahan atau perbedaan sistem kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Indonesia dengan di Malaysia. Perbedaan tersebut di antaranya didukung oleh adanya pilihan-pilihan yang dihadapi dalam proses transformasi nilai di daerah asal dalam penempatan baru. Nilai-nilai pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau semula di daerah asal terbagi atas dua iaitu Koto Piliang di bawah Datuk Ketemanggungan dan Bodi Caniago di bawah Datuk Perpatih di transformasi menjadi adat Temenggung dan Adat Perpatih. Adat Perpatih tetap mempertahankan tradisi pewarisan garis keturunan matrilineal yang menghuni dan dikukuhkan di penempatan baru Negeri Sembilan dan Ketemanggungan menjadi tradisi pewarisan garis keturunan patrilineal yang membuat penempatan di daerah kerajaan negeri lainnya di Malaysia.

Kata kunci: Transformasi nilai; migrasi; hukum adat Minangkabau; sistem kekerabatan Matrilineal; Adat Perpatih; Negeri Sembilan

ABSTRACT

The pull and push factor of migration has created a new settlement of Minangkabau tribe, which can be found in Sumatra island (as one of the Indonesia territory, since 1945). Migration caused number of consequences that must be faced by the people. Among the consequences are the transformation of value at the origin area into the new settlement. Without transformation of value, it will erode and will only be history. The next generation whose not inherit cultural values will become generation that uprooted from their culture and they will lost their identity. This paper elaborates the transformation of value among Minangkabau kinship relationship system as the identity of perpatih customary through a process of acculturation, socialisation and enculturation. The case study is Negeri Sembilan, Malaysia, as one of perpatih customary community. This paper was compiled from the research and discussions with the community members in Negeri Sembilan. The result of this study noted that the perpatih customary was recognised and enabled to remain preserved as the identity of community in Negeri Sembilan. Various efforts made to maintain perpatih customary, particularly through discussions, writings, variety of rituals, important occasions such as wedding ceremony and there is also the continually build kinship relationship with relatives from the origin area of Minangkabau. This study also found that the migration result of change and transformation in the Minangkabau matrilineal kinship systems among Indonesia and Malaysia. The difference between them is supported by the availability of options encountered in the

process of transformation in the area of the original in the new settlement. The value in Minangkabau matrilineal kinship systems in the county was divided of Koto Piliang under Datuk Ketemanggungan and Bodi Caniago under Datuk Perpatih and they are transformed into Temenggung and Perpatih customaries. Perpatih customary still maintain the tradition of inheritance lineage occupying matrilineal and strengthened in the new settlements of Negeri Sembilan, while Ketemanggungan as the patrilineal lineage inheritance traditions in other state of Malaysia district.

Keywords: Transformation value; migration; customary; Minangkabau; Matrilineal kinship relationship; Negeri Sembilan

PENDAHULUAN

Suku bangsa Minangkabau terkenal dengan budaya merantaunya. Bagi masyarakat suku bangsa dan penganut budaya *Matrilineal* Minangkabau, merantau akan berpengaruh kepada status sosial seseorang dalam keluarga, kaum kerabat dan masyarakatnya. Fenomena budaya ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk bermigrasi. *Pull* dan *push factor* migrasi telah menimbulkan penempatan baru suku bangsa Minangkabau di Negeri Sembilan, Malaysia. Migran dari Minangkabau ke Negeri Sembilan ditengarai pada pertengahan abad ke- 14. Migrasi apakah untuk menetap mahupun untuk sementara waktu tidaklah menyebabkan para migran melepaskan atau terlepas daripada nilai-nilai budaya yang telah dimiliki.

Nilai-nilai budaya tersebut mestilah diwariskan melalui proses yang berkelanjutan. Dalam era migrasi, transformasi nilai-nilai yang dibawa dari daerah asal akan menghadapi tantangan-tantangan dalam penerapannya, sehingga membuat para migran memilih. Kelebihan yang dimiliki berupa akal, membuatkan risiko-risiko daripada pilihan tersebut dapat diatasi dengan akulturasi, sosialisasi dan enkulturasi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya proses dan menetapkan nilai yang akan dipakai dan selanjutnya ditaati dan ditransformasikan lagi kepada generasi selanjutnya. Migran Minangkabau ke Negeri Sembilan telah memilih mentransformasikan dan mengekalkan nilai-nilai pada sistem kekerabatan *Matrilineal* dalam tradisi adat perpatih, sementara tradisi adat ketemanggungan dipakai oleh migran asal Minangkabau di kerajaan-kerajaan lainnya di Malaysia, seperti di Melaka.

Hidup itu pilihan. Pilihan yang pertama kali dihadapi manusia adalah hidup atau mati. Ketika pilihan adalah “hidup”, maka pilihan tersebut disusul oleh pilihan-pilihan selanjutnya iaitu senang, susah, bahagia, celaka, merugi, atau beruntung. Ketika manusia memilih untuk hidup senang, bahagia dan beruntung, maka konsekuensinya adalah berusaha melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan

dan yang dicita-citakan adalah hari ini lebih baik daripada hari kelmarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, maknanya selalu ada upaya agar ada perubahan keadaan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada saat perubahan terjadi, maka pihak yang mengalami perubahan dihadapkan kepada pilihan iaitu akan berubah secara langsung atau akan menjalani secara perlahan-lahan. Untuk itu tidak jarang muncul fenomena orang kaya baru (OKB), *cultural shock*, atau kehilangan akar budaya.

Seiring dengan manusia selalu berusaha berubah dan berkembang ke arah yang diperhitungkan lebih baik, maka perubahan dalam adat sebagai salah satu unsur budaya adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari mengiringi perubahan tersebut. Pilihan yang telah ditetapkan oleh para migran yang akan mentransformasikan nilai pada sistem kekerabatan *matrilineal* dengan penamaan tradisi Adat Perpatih dan bukan Adat Temenggung, merupakan suatu proses enkulturasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat penempatan dipilih. Pilihan ini diikuti oleh ketegasan sikap bahawa dalam proses transformasi nilai-nilai tersebut di Negeri Sembilan menganut aturan adat “biar mati anak daripada mati adat”. Daripada pilihan tersebut sekali gus ditegaskan pelaksanaan nilai-nilai “adat basandi sarak syarak basandi kitabullah” bahawa yang berurusan dengan dunia iaitu adat harus dipertahankan sedemikian rupa, sementara yang berhubungan dengan sang pencipta seperti mati tidak dapat ditentukan dan diupayakan oleh manusia. Daripada adanya pilihan nilai yang telah ditetapkan yang akan diterapkan dan dipertahankan, untuk ditransformasikan kepada generasi selanjutnya. Dalam proses transformasi ini terdapat upaya penyesuaian dengan adanya pengaruh globalisasi. Hanya saja perubahan dalam adat itu telah disikapi lebih awal dengan pepatah adat (perbilang adat terminologi adat Negeri Sembilan atau dalam tradisi adat di Malaysia) “*sakali aia gadang-sakali tapian barubah, namun barubah bakisa di lapiak nan sahalai*”.

PERKEMBANGAN DAN PENGHIJRAHAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
MINANGKABAU KE NEGERI SEMBILAN

Pandangan beberapa peneliti dan ahli, di antaranya Amin Sweeny (2011: 2) menyatakan bahawa aksara lisan merupakan bukti sejarah yang tidak boleh dikesampingkan. Mengacu kepada pandangan ini, maka menurut Tambo nenek moyangnya masyarakat yang dijuluki sebagai masyarakat adat Minangkabau berasal dari gunung merapi (lihat juga Muchtar Naim, 1986: 61). Dirwayatkan bahawa di Gunung Merapi masyarakat ini terbagi atas 3 (tiga) kelompok yang ditentukan oleh nama tempat mengambil air dan tempat mandi yang dinamakan dengan *luhak*¹ (sumur). Luhak-luhak tersebut adalah luhak Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota (koto) (Dt. Maruhun & Dt. Bagindo Tan Ameh, t.th: 13) Dari 3 (tiga) daerah ini kemudian terjadi perpindahan ke 3 (tiga) daerah, yang pertama iaitu ke daerah yang kemudian dijuluki Tanah Datar dan lebih dikenal dengan *Luhak Tanah Datar*. Daerah ini diakui sebagai *luhak nan tuo* (tertua) di Minangkabau. Kemudian disusul dengan perpindahan ke daerah yang dijuluki sebagai *Luhak Agam* yang terletak di sebelah barat kaki Gunung Merapi. Terakhir adalah ke *luhak limo puluah koto*. Lima keluarga di antara anggota rombongan terakhir tersebut melanjutkan perjalanan sampai ke hilir sungai yang kemudian dikenal dengan Kampar Kanan, dengan *nagari* yang pertama didirikan di daerah ini adalah Kuok dan Bangkinang. Daerah ini kemudian dikenal dengan 5 Koto. Ketiga daerah tersebut kemudian dibagi atas 2 (dua) *laras*², yang dikenal dengan *Laras Koto Piliang*³ dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan dan Bodi Caniago³ dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang. Dengan terbentuknya *laras nan duo*, maka Minangkabau terkenal dengan *luhak nan tigo, laras (lareh) nan duo*. Luhak menunjukkan pembahagian daerah berdasarkan asal dan perkembangan masyarakat, sedangkan *laras (lareh)* menunjukkan pembahagian bentuk peraturan yang berlaku dan pada tahap selanjutnya akan menentukan bentuk kepemimpinan (dalam ketatanegaraan akan merupakan ciri-ciri bentuk pemerintahan) dan bentuk hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Ditengarai bahawa dalam perkembangannya kelurahan Koto Piliang cenderung kepada sistem aristokrat, sedangkan kelurahan Bodi Caniago lebih kepada sistem konfederasi.

Di daerah asal adat Minangkabau sebetulnya sudah terjadi juga pilihan nilai oleh masyarakat pada saat pembahagian dua kelurahan (Koto Piliang dan Bodi Caniago). Pemisahan aturan adat yang radikal menyebabkan masyarakat pada beberapa daerah yang terdapat di Luhak Tanah Datar tidak dapat menerimanya dan tidak dapat memilih salah satu di antara keduanya, akhirnya menetapkan percampuran daripada keduanya, dan menerapkan kedua bentuk aturan yang ada yang akan berlaku di daerahnya. Aturan adat tersebut direfleksikan dalam pantun adat berikut:

“Pisang sikalek-kalek hutan,
Pisang tumbatu bagatah,
Bodi Caniago inyo bukan,
Koto Piliang inyo antah.

Ciri daerah ini adalah *balanggam Koto Piliang, ba adat Bodi Caniago* (bergaya atau mempunyai struktur masyarakat Koto Piliang tetapi memperlakukan adat Bodi Caniago). Sehingga adanya penggabungan antara *adat bajanjang naiak, batanggo turun* dengan *musyawarah-mufakat*. Wilayah yang termasuk kelompok ini adalah *Salilieik* (sekeliling) Batang Bangkaweh mulai dari Guguk Sikaladi hilir sampai ke Bukit Tumasu Mudik. Daerah-daerahnya adalah 8 (delapan) Koto Di atas (yang terdiri dari; Guguk, Sikaladi, Pariangan Padang Panjang, Koto Baru, Sialahan, Koto Tuo, Batu Basa) dan Tujuh Koto Di bawah (yang terdiri dari; Galo Gandang, Padang Luar, Turawan, Balimbing, Kinawai, Sawah Kareh dan Bukit Tummasu) (St. Mahmoed & A.M. Rajo Panghulu 1978: 34-35).

Laras tersebut kemudian di bagi dalam bentuk nagari-nagari baru. Nagari yang tertua adalah nagari Pariangan dan nagari yang pertama dibentuk di Minangkabau adalah nagari Sungai Tarab di Luhak Tanah Datar, dengan penghulunya adalah Datuk Bandaro Putieh, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan nagari di Luhak Agam dan Limo Puluah Koto (St. Mahmoed & A.M. Rajo Panghulu 1978: 24). Nagari yang dibentuk di Luhak Agam adalah Biaro dengan penghulunya Datuk Bandaro Panjang, Baso dengan penghulunya Datuk Bandaro Kunieng, sedangkan nagari yang dibentuk di Luhak Limo Puluah Koto adalah Situjuh, Batuhampa, Koto Nan Gadang, dan Koto nan Ampek. Pada ke empat nagari ini diangkat dua orang penghulu iaitu Datuk Rajo Nun dan Datuk Sadi Awal.

Dikaitkan dengan konsep “demografi”, perpindahan penduduk dari pinggang Gunung

Merapi dan kemudian membentuk Luhak Tanah Datar, Agam Dan Limo Puluah Koto, dapat dinyatakan telah terjadinya migrasi. Mencari daerah penempatan baru merupakan tuntutan daripada pertambahan jumlah anggota kelompok. Baik pertambahan jumlah tersebut memerlukan daerah baru atau sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Bagi masyarakat adat Minangkabau, pemenuhan kebutuhan hidup tersebut diupayakan dengan mencarinya di luar penempatan atau di luar daerah permukiman mereka. Fenomena ini kemudian populer dengan sebutan “merantau”. Merantau merupakan budaya yang dianut di kalangan masyarakat adat Minangkabau (Muchtar Naim 1986: 61). Perpindahan yang dilakukan oleh masyarakat asal Minangkabau ini dapat dinyatakan merantau tahap pertama, sedangkan merantau tahap ke dua dilakukan ke daerah sekeliling Luhak Nan Tigo. Merantau tahap kedua telah dilakukan sebelum abad ke-6, semenjak itu telah terjadi gelombang “merantau” tahap ketiga yang meliputi daerah atau wilayah “rantau” yang oleh Muchtar Naim (1979 : 66) dinyatakan sebagai daerah “koloni. Daerah tersebut tidak hanya meliputi daerah-daerah di sekitar Luhak nan Tigo (yang merupakan kampung halaman atau daerah asal orang Minangkabau), tetapi telah meliputi daerah yang lebih jauh sampai ke pesisir pantai barat iaitu; Sikilang Air Bangis ke utara, ke selatan ke Muko-Muko dan Bengkulu. Ke Utara Agam iaitu ke Pasaman, Lubuksikaping dan Rao sampai ke perbatasan Mandahiling. Ke selatan dan tenggara Luhak Tanah Datar iaitu ke daerah Solok-Selayo, Muara Panas, Alahan Panjang-Muara Labuh, Alam Surambi-Sungai Pagu dan Sawah Lunto-Sijunjung sampai ke perbatasan Riau dan Jambi (Muchtar Naim 1979: 61). Bahkan dalam abad ke-16 telah menyeberangi selat Melaka seperti yang diamati oleh Albuquerque (J.D. Jong 1971: 334), dikemukakan bahawa pada tahun 1512 telah berdatangan “imigran” Minangkabau ke kota “takluknya”. Daerah rantau tahap ketiga ini disebut juga dengan “*rantau nan tigo jurai*”, yang terdiri dari hulu sungai Batang Hari, hulu sungai Batang Kuantan, dan hulu sungai Kampar Kiri. Upaya untuk memperluas daerah penempatan baru lebih nyata dengan keberadaan imigran-imigran dari Minangkabau di Nanning Negeri Sembilan (Wilkinson 1971 dalam Muchtar Naim 1971: 69).

Kedatangan perantau dari Minangkabau ke Semenanjung Tanah Melayu tidak dilakukan sekali gus tetapi secara bertahap dan melalui jalur yang berbeda-beda dan secara estafet. Noorhalim Ibrahim

(dalam Adat Perpatih 2007) mengistilahkan kedatangan generasi kedua dan ketiga dari Siak ke Negeri Sembilan sebagai “pelarian” dari Luhak nan Tigo karena alasan sosiobudaya dan ekonomi. Pada awal kedatangan dinyatakan melalui tiga jalur utama iaitu Temasik, Sungai Linggi, Sungai Muar, Jalan Penarikan, dan kedatangan selanjutnya melalui jalur Segenting Langkap, Sungai Teriang serta melalui Sungai Langat (Noorhalim Ibrahim dalam Adat Perpatih 2007). Migrasi yang agak besar tiba di Rembau dan Nanning sekitar tahun 1260 (1849: 155). Kedatangan migran secara estafet dari Minangkabau ini diketahui dari kedatangan para migran dari Siak pada akhir abad ke-12. Perantau dari Siak ini ditengarai adalah generasi kedua dan ketiga keturunan Minangkabau tiba di Sungai Linggi (Norhalim Ismail 2007). Ertinya rantau tahap ketiga telah melahirkan rantau tahap keempat bagi suatu kelompok seperti dari Siak tersebut. Hal ini dapat difahami karena pengangkutan yang digunakan adalah melalui darat dengan alat pengangkutan seadanya atau mungkin hanya dengan jalan kaki dan melalui sungai. Untuk sampai ke Semenanjung sudah barang tentu melayari lautan. Jalan laut yang paling dekat adalah di Tamasek dan Johor, serta Melaka, melalui Kepulauan Riau (sekarang).

TRANSFORMASI NILAI PADA SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL MINANGKABAU DI NEGERI SEMBILAN

Mencari daerah dan membuat penempatan baru merupakan peristiwa demografi yang selalu terjadi dalam kalangan masyarakat Minangkabau, sehingga akhirnya dikenal rantau sampai ke Semenanjung. Di antara daerah Semenanjung yang dijadikan penempatan baru oleh para migran dari Minangkabau dan terjadinya proses transformasi nilai-nilai pada sistem kekerabatan Minangkabau di daerah penempatan baru adalah di Negeri Sembilan.

Telah dikemukakan bahawa dalam sejarah penghijrahan masyarakat adat Minangkabau ke Semenanjung terjadi secara bertahap. Di kalangan masyarakat adat Minangkabau, yang merantau pada mulanya adalah laki-laki terutama yang muda, hal ini dinyatakan dalam pantun adat:

Karatau matang kahulu
Babuah babungo balun,
Karantau bujang dahulu,
Di rumah baguno balun.

Untuk itu, fenomena yang tidak dapat dielakkan adalah terjadinya perkahwinan dengan perempuan penduduk asli (orang asli) daerah tempatan. Orang asli daerah ini disebut suku kaum Sakai, Semang dan Jakun. Mereka hidup berpindah (nomad) dan memenuhi kebutuhan hidup daripada berburu dan meramu daripada kemudahan alam, dan ada yang mulai bertani. Keturunan yang lahir daripada perkahwinan tersebut menimbulkan fenomena terbentuknya suku Biduanda. Suku Biduanda adalah pewaris asal Negeri Sembilan dan pemimpin hanya dipilih daripada suku ini (Mohd Shah bin Mohd Said al-Haj 2000).

Pada awalnya orientasi merantau bagi masyarakat hukum adat Minangkabau adalah untuk kembali ke kampung. Dengan adanya fenomena melangsungkan perkahwinan di rantau dengan orang asli, sudah barang tentu suatu waktu rumah tangga yang dibina di rantau akan ditinggalkan. Apatah itu di tinggal untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama untuk pulang ke kampung di Minangkabau, bahkan mungkin tidak kembali lagi ke rantau karena menikah lagi di kampung halaman. Fenomena menikah lagi di kampung halaman bagi seorang laki-laki Minangkabau yang pergi merantau masih berlangsung sampai awal tahun 1970-an. Setidaknya sampai diberlakukan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkahwinan. Dalam kondisi demikian, maka anak akan lebih dekat dengan ibu dan keluarga ibunya. Daripada fenomena ini secara sengaja atau tidak telah terjadi transformasi nilai pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, sehingga pada tahap ini terjadi akulturasi antara kebudayaan masyarakat asli dengan masyarakat migran. Akulturasi adalah suatu proses sosial pada saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur daripada suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Daripada fenomena akulturasi yang terjadi pada penghijrahan suku Minangkabau dan terjadinya penerimaan nilai pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan tidak diketahui adanya kesan penolakan. Fenomena ini dapat dinyatakan sebagai telah terjadinya akulturasi. Oleh beberapa peneliti tentang Negeri Sembilan ini ditengarai bahawa masyarakat asli telah menganut nilai-nilai budaya pada sistem kekerabatan matrilineal. Untuk itu, begitu terjadi perjumpaan nilai budaya, maka nilai budaya tersebut melebur, sehingga pada saat

bertemu dengan nilai yang dibawa oleh migran dari Minangkabau terjadinya suatu proses sosial. Oleh Abdul Samad Idris (1990: 32) pertemuan dua budaya ini dinamakan dengan pertembungan dua budaya, iaitu budaya Minangkabau dan penduduk asli Negeri Sembilan (orang-orang asli atau Proto Melayu) telah melahirkan budaya (tamadun) yang lebih cenderung menerapkan aturan hidup Minangkabau sehingga melenyapkan satu sama lain budaya dan sistem sosial penduduk asli.

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang secara kontinum ditaati, dipertahankan dan diajarkan daripada generasi ke generasi berikutnya. Disadari atau tidak, di sengaja atau tidak pada suatu masyarakat akan selalu terjadi proses mengajarkan kebudayaan dan ini yang dinamakan dengan transformasi nilai-nilai pada kebudayaan atau pewarisan kebudayaan. Unsur kebudayaan tersebut adalah sistem bahasa, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, ilmu pengetahuan, kesenian dan sistem kepercayaan unsur-unsur kebudayaan ini oleh Kuntjaraningrat (1992) dijabarkan ke dalam beberapa bahagian iaitu:

1. Sistem bahasa lisan dan tulis.
2. Sistem pengetahuan. Pengetahuan tentang alam sekitar, alam flora, tentang zat-zat dan bahan mentah, tentang tubuh manusia, kelakuan sesama manusia, tentang ruang, waktu dan bilangan.
3. Organisasi sosial terdiri daripada sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat, asosiasi perkumpulan, sistem kenegaraan.
4. Sistem peralatan dan teknologi, meliputi alat-alat produktif, alat-alat distribusi dan transportasi, wadah dan tempat perhiasan, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, dan tempat berlindung dan perumahan, senjata.
5. Sistem mata pencarian hidup terdiri daripada berburu dan meramu, perikanan, bercucuk tanah di ladang, bercucuk tanah menetap, penternakan, dan perdagangan.
6. Sistem religi terdiri daripada sistem kepercayaan, kesusasteraan suci, sistem upacara keagamaan, kelompok keagamaan, ilmu gaik, dan sistem nilai dan pandangan hidup.
7. Kesenian, seni tari, muzik, seni suara, pahat, lukis, seni rias, seni instrumen, seni kesusasteraan dan seni drama.

Transformasi nilai yang akan diungkapkan pada tulisan ini adalah berkaitan dengan sistem

sosial dan lebih khusus lagi adalah pada sistem kekerabatan. Dalam pengkajian kebudayaan unsur-unsur itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk itu pada tulisan ini akan juga menyinggung unsur kebudayaan lainnya untuk memberi lebih pertegasan unsur kebudayaan yang sedang diungkapkan, namun tetap dalam konteks sistem kekerabatan. Membicarakan sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tidak terlepas daripada membicarakan kesatuan hidup setempat atau komunitas. Koentjaraningrat (1992: 161) mengungkapkan bahwa komunitas adalah kesatuan sosial yang terjadi bukan karena adanya ikatan kekerabatan sebagaimana kelompok kekerabatan, akan tetapi karena ikatan tempat kehidupan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa orang yang tinggal bersama di suatu wilayah tertentu belum dapat dikatakan *community* bila mereka tidak merasakan terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayahnya, sehingga mereka segan untuk tinggal di wilayah yang lain.

Etimologi daripada terminologi kekerabatan berasal daripada bahasa Arab iaitu kata karib, yang terbentuk dari 3 suku kata, iaitu “qaf, ra, dan ba” menjadi kata “quraba, quruba, qurbaan wa qurbaanan”, yang ertinya dekat, atau sesuatu yang mendekatkan sesuatu dengan yang lainnya. Ikatan kekerabatan itu timbul karena adanya rasa saling dekat, walaupun wilayahnya berbeda dan jaraknya jauh. Itulah yang terjadi pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Nilai-nilai tersebut telah disepakati dan tertanam dalam lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat membedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi dalam masyarakat matrilineal Minangkabau.

Sebagai salah satu unsur kebudayaan, sistem kemasyarakatan mempunyai nilai-nilai budaya yang ditransformasikan. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai yang ditransformasikan tersebut di antaranya berkaitan dengan tata kekerabatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, tata hukum,

dan perkahwinan. Dalam proses belajar kebudayaan manusia tentunya tidak begitu saja menerima apa adanya. Ia akan selalu menggunakan daya nalarnya untuk memahami, menyelami, memilih, dan melaksanakan apa yang menurut pandangannya baik. Biasa saja yang ia lakukan sedikit berbeda atau berbeda sama sekali dengan yang diajarkan oleh kebudayaan atau masyarakatnya. Perbedaan ini awalnya bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat, namun jika kemudian dapat saling menyesuaikan diri, konflik itu pun akan hilang. Proses transformasi budaya dapat dilakukan melalui ucapan, sikap, atau perilaku yang sudah terpola. Berikut ini dikemukakan nilai-nilai pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang di transformasi pada masyarakat di Negeri Sembilan. Bertitik tolak daripada makna kekerabatan sebagai hal yang menyangkut hubungan hukum antara orang dalam pergaulan hidup, maka transformasi nilai-nilai pada sistem kekerabatan matrilineal yang dikemukakan pada tulisan ini adalah meliputi:

1. Organisasi Kemasyarakatan

Bentuk organisasi kemasyarakatan pada masyarakat adat Minangkabau terbagi 3 iaitu struktur Koto Piliang, Bodi Caniago, dan percampuran antara Bodi Caniago dan Koto Piliang. Ketiga struktur ini menganut sistem kekerabatan matrilineal. Pada Koto Piliang yang dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan, struktur masyarakat adalah *bajanjang naiak batanggo turun* dan pada Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang struktur masyarakat *duduk sama rendah tegak sama tinggi* dan semua diputuskan berdasarkan *musyawarah mufakat*, sedangkan pada penggabungan keduanya struktur masyarakatnya *bajanjang naiak batanggo turun dan duduk samo randah tagak samo tinggi*. Struktur organisasi kemasyarakatan ini adalah:

- a) *Jurai*. Jurai diertikan juga dengan keluarga “se-dapur” (Iskandar Kemal 1965: 29). Jurai akan dipimpin oleh mamak.
- b) *Paruik*. Paruik terhimpun tidak lebih dari lima generasi ibu ke atas Paruik (Iskandar Kemal 1965: 29), dipimpin oleh mamak
- c) *Suku*. Suku merupakan gabungan atas beberapa paruik, yang dipimpin oleh penghulu. Di Minangkabau terdapat 4 suku asal iaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Suku-suku ini kemudian berkembang atau di pecah-pecah sesuai dengan aturan adat *gadang manyimpang-leba basibiran*, dan

- nagari pun di pecah-pecah sehingga di sinyalir terdapat lebih kurang 400 buah suku di Minangkabau (Sumatera Barat). Pemecahan ini tetap merujuk kepada suku asal (suku yang empat). Setiap nagari akan mempunyai pemecahan suku yang berbeda-beda, namun tetap dalam koridor suku yang empat. Pecahan tersebut kadang kala tidak lagi menunjukkan adanya nama suku asli yang empat, seperti menjadi: Suku Piboda, Suku Pitopang, Suku Tanjung, Suku Sikumbang, Suku Guci, Suku Panai, Suku Jambak, Suku Panyalai, Suku Kampai, Suku Bendang, Suku Malayu, Suku Sipisang, Suku Bendang, Suku Kutianyie, Suku Payobada, Suku Pitopang, Suku Mandailiang, Suku Mandaliko, Suku Sumagek, Suku Dalimo, Suku Simabua, Suku Salo, Suku Singkuan.
- d) *Nagari*. Nagari sebagai kesatuan genealogis territorial pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Nagari terbentuk dari gabungan suku (yaitu 4 suku pada mulanya) dan kemudian menjadi wilayah administratif. Dengan diperlakukan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, nagari di Minangkabau tidak lagi menjadi wilayah administratif sampai akhirnya diperlakukan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan dengan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2001, nagari kembali diakui sebagai suatu daerah administratif.

Pada tahap awal diakui bahawa migran dari Minangkabau kebanyakan datang dari Tanah Datar dan Payakumbuh. Di Negeri Sembilan sebagai daerah rantau, memilih struktur organisasi yang dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang, dan menamakan struktur organisasi yang dipilih sebagai Adat Perpatih. Dari fenomena ini dapat dinyatakan bahawa para migran ini datang dari luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh yang menganut sistem kelarasan Bodi Caniago, sehingga di Negeri Sembilan terjadi transformasi nilai dengan menyesuaikan dengan lingkungan di daerah baru dengan tidak lagi memakai sistem kelarasan tetapi langsung menggunakan nama pemimpin yang ajarannya mereka anut dan setuju.

Struktur organisasi masyarakat matrilineal Minangkabau di Negeri Sembilan adalah:

- i. *Perut*. Perut adalah unit yang terkecil di mana anggota sesuatu perut itu adalah berasal dari moyang (keturunan perempuan) yang sama. Mereka ini sangat erat dan biasanya tinggal di suatu perkampungan atau kawasan yang sama. Setiap perut mempunyai seorang ketua yang dinamakan (diberi gelar) *Buapak*. Buapak dipilih oleh anggota perut.
- ii. *Suku*. Suku terbentuk dari beberapa perut yang menjadikan keluarga tersebut semakin besar. Suku diketuai oleh seorang ketua yang digelar *Dato' Lembaga*. Suku-suku di Negeri Sembilan diberi nama sesuai dengan daerah asal para migran. Suku-suku tersebut berjumlah 12 suku, iaitu: Suku Biduanda (dondo), Batu Hampar (Tompar), Paya Kumbuh (Payo Kumbuh), Mungkal, Tiga Nenek, Seri Melenggang (Somolenggang) Seri Lemak (Solomak), Batu Belang, Tanah Datar, Anak Acheh, Anak Melaka dan Tiga Batu. Berbeda dengan di daerah asalnya, suku-suku ini tidak ditetapkan mengacuk kepada suku; Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Suku lebih ditetapkan berdasarkan nama daerah asal para migran. Suku-suku ini juga tidak mengalami perkembangan seperti halnya di daerah asal, tetapi tetap dipertahankan keberadaannya sampai sekarang.
- iii. *Luak*. Luak adalah unit sosiopolitik wilayah administratif dari segi adat. Di Negeri Sembilan terdapat empat luak utama iaitu Rembau, Sungai Ujung, Johol dan Jelebu. Setiap luak diketuai oleh seorang *Undang*. Selain dari empat luak utama ini ada lagi luak yang dinamakan *Luak Tanah Mengandung*. Luak Tanah Mengandung terdiri dari lima luak kecil di Seri Menanti iaitu Luak Inas, Luak Ulu Muar, Luak Gunung Pasir, Luak Terachi dan Luak Jempol. Setiap luak kecil ini diatur oleh seorang ketua yang bergelar *Penghulu Luak*.

Keberadaan struktur organisasi masyarakat matrilineal Minangkabau di Negeri Sembilan dinyatakan juga dalam bentuk gurindam, yang berbunyi:

Raja beralam
 Penghulu berluak
 Lembaga berlingkungan

Buapak beranak buah
 Anak buah duduk bersuku-suku
 Berapa sukunya?
 Dua Belas!

Telah dikemukakan bahawa telah terjadi transformasi nilai dari daerah asal ke daerah penempatan baru. Transformasi dilakukan juga dilakukan dengan melakukan pilihan-pilihan. Pilihan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dengan di daerah asal, seperti yang telah dikemukakan di atas.

2. Tata Hukum

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu tulisan ini bahawa masyarakat matrilineal Minangkabau terbagi atas 3 *balanggam Koto Piliang*, *ba adat Bodi Caniago* (bergaya atau mempunyai struktur masyarakat *Koto Piliang* tetapi memperlakukan adat *Bodi Caniago*). Sehingga adanya penggabungan antara *adat bajanjang naiak*, *batanggo turun* dengan *musyawarah-mufakat*. Untuk itu terdapat tiga bentuk aturan adat pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau di daerah asal. Sementara itu di Negeri Sembilan hanya satu aturan adat yang digunakan iaitu adat Perpatih.

3. Organisasi Politik

Dalam sejarah Minangkabau ada kerajaan, namun kerajaan tidak berpengaruh banyak terhadap hubungan kekerabatan matrilineal Minangkabau dalam konsep hubungan yang diatur dalam adat iaitu "*kamanakan barajo ka mamak mamak barajo ka panghulu-panghulu barajo ka nanbana sasuai jo alua dan patuik*". Pola pemerintahan pada masa pemerintahan Adityawarman di kerajaan Pagar Ruyung tidak banyak menyebabkan perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Masyarakat tetap hidup sesuai dengan pola dan struktur yang telah mereka miliki, bahkan Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang secara tidak sengaja menetapkan dan memperkuat pola hubungan *mamak - kemenakan* dengan membentuk aturan pewarisan menurut garis keturunan pada sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini tertuang di dalam aturan adat *batali cambua*.

Organisasi politik menjadi dasar dalam pembentukan nagari-nagari di Minangkabau. Ikatan teritorial yang paling rendah adalah *taratak*, disusul oleh *kampung*, lebih lanjut *koto*,

dan terakhir adalah *nagari*. Nagari merupakan percampuran beberapa koto yang memenuhi persyaratan yang terefleksi dari pantun adat berikut:

"Basawah baladang,
 batambak bapanyabungan,
 badusun bagalanggan,
 baparik nan tarantang,
 baitiak baayam."
 baranak bakamanakan,
 baayam bakambiangan,
 batabek batanam-tanaman,
 bakorong bakampuang,
 bacupak bagantang,
 baradat balimbago,
 bataratak ba kapalo koto,
 babalai bamusajik,
 balabua bagalanggan,
 batapian tampek mandi,
 bapanghulu kaampepek suku untuk mamintak hukum
 adat bak kawi ."

Pada suatu nagari harus terdapat 4 buah suku, masing-masing suku dipimpin oleh satu orang penghulu. Pada saat suku yang empat ini berkembang, maka penghulu suku yang empat ini dinamakan *Penghulu Pucuk*. Penghulu pucuk inilah yang harus selalu hadir dalam kerapatan atau dalam musyawarah adat.

Aturan adat di Minangkabau tidak menerapkan dan tidak dikaitkan dengan sistem kerajaan seperti halnya di Negeri Sembilan. Nilai-nilai yang ada daripada hadirnya kerajaan Pagar Ruyung yang diperintah oleh raja Adityawarman tidak terakulturasi dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Hal itu ditunjukkan dengan berakhirnya kerajaan Pagar Ruyung, menjadikan suatu fenomena kerajaan yang pernah ada di Minangkabau. Fenomena ini masih perlu dikaji lebih mendalam, apatah hal itu disebabkan oleh raja di kerajaan itu bukanlah berasal daripada keturunan Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Untuk itu kehidupan "berkerajaan dan beraja" tidak menjadi melembaga dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Untuk itu pepatah adat: *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka nan bana sasuai jo alua dan patuik*" yang menunjukkan status "rajo" adalah berada dalam konteks hubungan kekerabatan, bukan dalam konteks hubungan dalam ketatanegaraan (publik).

Di Negeri Sembilan sebagai daerah rantau menerapkan sistem beraja dan ini sesuai dengan pantun adat yang berbunyi, *kampung ba panghulu, rantau barajo*. Nilai ini dibawa, bahkan dipertahankan dengan mendatang (menjemput) raja dari Minangkabau (daerah asal). Sistem politik “beraja” ini di Negeri Sembilan tetap utuh. Itu juga disebabkan oleh sistem pemerintahan di Malaysia telah memilih bentuk pemerintahan beraja dan berparlimen.

Dari segi organisasi politik, Noorhalim (dalam Adat Perpatih 2007:16) mengemukakan bahawa kedatangan perantau dari Luhak nan Tigo terjadi sebelum abad ke-14 dan membuka taratak, kemudian kampung dan selanjutnya

dusun. Hal ini dinyatakan dalam pantun adat, yang berbunyi:

Taratak mula dibuat,
Sudah taratak menjadi kampung,
Sudah kampung menjadi dusun,
Sudah dusun menjadi kota (penulis koto),
Sudah Kota menjadi negeri

Noorhalim Ismail (dalam Adat Perpatih) mengaitkan pembentukan kerajaan Rembau dengan pembentukan negeri di Negeri Sembilan, sehingga dinyatakan bahawa pembentukan taratak menjadi negeri menghabiskan waktu + 2 abad seperti pada Jadual 1.

JADUAL 1. Metamorfosis Pembangunan Kerajaan Rembau

No.	Proses metamorphosis berdasarkan Pantun (proses metamorphosis mengikut Perbilangan)	Tahun terjadi (Tarikh berlaku)
1.	Taratak mula dibuat	Abad ke-12
2.	Sudah teratak menjadi kampung	Abad ke-13 (1260)
3.	Sudah kampung menjadi dusun	Abad ke-14 (1330)
4.	Sudah dusun menjadi kota	Tahun 1520-an
5.	Sudah kota menjadi negeri	Tahun 1540

Sumber: Noorhalim Ismail dalam Adat Perpatih (2007:17)

4. Tata Kekerabatan dan Perkahwinan

Kekerabatan pada masyarakat matrilineal Minangkabau adalah garis keturunan menurut garis keturunan ibu. Pada garis keturunan ibu terdapat pembahagian peran antara laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri atau karakteristik hubungan kekerabatan matrilineal seperti yang dikemukakan oleh J. De Jong (1960 : 84), lihat juga Muhammad Radjab (1969). Ciri-ciri tersebut adalah:

- a. Keturunan menurut garis ibu (*matrilineal descent*),
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu (*matrilineal clan*),
- c. Kahwin harus keluar suku (*clan-exogamy*),
- d. Balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum (vendetta as a duty of entire clan),
- e. Kekuasaan secara teoretis di tangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan (*clan authority theoretically in hands of the “mother”, but rarely exercised by her in practice*),
- f. Adanya kekuasaan mamak (saudara laki-laki ibu) (*authority of mother’s brother*),

- g. Dalam perkahwinan suami tinggal di rumah kaum isteri (*matrilocal marriage or visit of husband to his wife*),
- h. Warisan diturunkan daripada mamak kepada anak daripada saudara perempuan (*kemenakan*) (*succession of dignities from mother brother to sister son*).

Mengacu kepada ciri-ciri tersebut, maka syarat atau nilai yang disepakati untuk dinyatakan sebagai orang Minangkabau adalah:

- a. Basuku, bamamak, bakamanakan
- b. Barumah gadang
- c. Basasok bajarami
- d. Basawah baladang
- e. Bapandan pakuburan
- f. Batapian tampek mandi

Ciri-ciri tata kekerabatan pada masyarakat matrilineal Minangkabau di Negeri Sembilan adalah:

- a. Keturunan menurut garis ibu (*matrilineal descent*).
- b. Seseorang akan menjadi anggota suku ibunya (*matrilineal clan*).

- c. Kahwin harus keluar suku (*clan-exogamy*). Perkahwinan seperut atau sesuku adalah dilarang. Hubungan dalam sesuatu perut dan suku adalah erat, laki-laki akan menganggap pertemuan adalah saudara perempuannya dan begitu sebaliknya.
- d. Perempuan mewarisi pusaka (pusako) berupa harta daripada ibu, dan laki-laki menyangand saka (sako) atau gelar adat.
- e. Dalam perkahwinan suami tinggal di rumah ibu si isteri (*matrilocal marriage or visit of husband to his wife*).

MASIH SIGNIFIKAN MEMBICARAKAN ATURAN ADAT DALAM ERA GLOBALISASI?

Diskusi tentang hal ini sengaja penulis tampilkan untuk memulai diskusi-diskusi lebih lanjut tentang kekayaan budaya adat matrilineal Minangkabau. Masyarakat ini terkenal sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia, demikian pada umumnya para peneliti organisasi sosial atau sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau baik dalam mahupun luar negeri akan memberi kesimpulan demikian, seperti: Willinck 1909; Josselin De Jong 1967; Muchtar Naim 1979 dan lain-lainnya. Banyak lagi peneliti dan peminat dalam pengkajian Asia Tenggara yang tertarik dan berdatangan ke tanah Minangkabau. Sementara oleh sebahagian kalangan masyarakat termasuk beberapa masyarakat matrilineal Minangkabau sendiri menyatakan bahawa tradisi adat Minangkabau ini dianggap kolot, ketinggalan zaman, tidak dapat diubah karena *tak lakang dek paneh- tak lapuak dek hujan*, sudah using (*lapuk*) dan berbagai julukan negatif. Sebagai contoh bagaimana masyarakat “mencaci” adat *japuik manjapuik* dalam perkahwinan masyarakat Minangkabau di Pariaman. Masyarakat tidak mengangkat nilai positif dalam kaitannya dengan keberadaan dan keberlanjutan hubungan kekerabatan masyarakat adat Minangkabau di Pariaman. Sebahagian masyarakat merasa “malu” dan “terhina” bila terjadi perkahwinan dan menggunakan adat “*manjampuiik dan uang jamputan*”. Pelaksanaan aturan adat ini dihadapkan kepada tradisi moden yang dianggap maju, fleksibel, terkemuka, terkini, dapat digunakan oleh banyak orang, dan berbagai penilaian positif.

Penerapan dan mengembangkan kerangka analisis dikotomi sosial (*social dichotomy*) yang

mempertentangkan kehidupan tradisional dan modern, merupakan kerangka analisis dan metode penelitian dan pembahasan suatu masalah sosial yang perlu dipertimbangkan untuk suatu kondisi. Roscoe Pound (1986) mengisyaratkan bahawa berlakunya suatu aturan tersebut tidaklah dapat ditetapkan kepada semua masyarakat karena terikat waktu dan tempat (*time and place*) dan setiap masyarakat mempunyai kebudayaan (*civilization*). Kebudayaan tersebut dinyatakan sebagai jiwa bangsa oleh C van Vollenhoven (1925). Untuk itu mempertentangkan antara tradisional dan moden, dan menyatakan bahawa yang tradisional adalah yang kuno dan sudah masanya ditinggalkan, adalah suatu analisis yang perlu diteliti dengan hati-hati. Adakah kebudayaan yang merupakan budaya atau jiwa bangsa ini akan dihilangkan?

Menurut Shamsul Amri (dalam Adat Perpatih 2007: 250), pemikiran seperti itu berasal daripada cara orang Eropah membedakan dirinya dengan bukan Eropah. Lebih lanjut dinyatakan bahawa orang Eropah menganggap bahawa diri mereka moden, maju, *sophisticated*, beradab, terkemuka, sedangkan orang bukan Eropah adalah kolot, mundur, primitif, ganas, tak beradab, dan ketinggalan zaman. Shamsul Amri lebih lanjut mengikatkan bahawa dengan pandangan ini telah dijadikan alasan oleh orang Eropah untuk menjajah orang bukan Eropah agar beradab, dimajukan dan diselamatkan daripada kemunduran dan kegelapan hidup. Pandangan ini patut kita renungkan dan disikapi dalam menentukan jati diri dan mempertahankan identitas. Hal ini untuk menghindari masyarakat kehilangan budaya dan tercerabut daripada akar budayanya.

Mempertahankan akar budaya bagi masyarakat hukum adat Minangkabau sebetulnya telah diantisipasi daripada awal dengan pepatah adat, “*Tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*” untuk adat *nan sabana adat*. Sementara untuk aturan adat istiadat “*sakali aia gadang, sakali tapian baranjak*”. Berubah pun diingatkan *bakisa dilapiak nan sahalai*. Ertinya, walaupun akan berubah tetapkan dalam koridor adat Minangkabau supaya *jalan jaan dianjak urang lalu*. Melalui pantun adat ini generasi Minangkabau telah diingatkan supaya jangan dienyahkan apalagi dijajah oleh orang lain. Fenomena yang saat ini perlu disikapi oleh masyarakat yang menyatakan diri sebagai penyandang adat Minangkabau adalah unsur-unsur kebudayaannya sudah mulai terkikis. Sebagai contoh bahasa Minang sudah mulai terkikis dalam bahasa pergaulan seharian (kiranya ini perlu dikaji

lebih jauh); pantun-pantun adat dan pantun dalam “*pasambahan*” sudah jarang didengar, walaupun ada itu sudah sulit dicari dan akan “*mahal*”.

Fenomena yang dihadapi oleh masyarakat adat Minangkabau di daerah asal ini sudah masanya perlu disikapi. Di daerah rantau, fenomena terhakisnya nilai-nilai budaya adat Minangkabau yang dikenal dengan Adat Perpatih telah lama disikapi dengan melakukan transformasi secara terus menerus, tidak saja oleh masyarakat yang akan mengamalkan tetapi juga oleh pemerintah kerajaan Negeri Sembilan bahkan oleh Kerajaan Persekutuan. Di daerah rantau Adat Perpatih dinyatakan sebagai identitas masyarakat Negeri Sembilan. Pepatah (disebut perbilangan) adat menegaskan *bia mati anak daripada mati adat*. Dari sudut epistemologi, pepatah adat ini sangat halus karena di dalamnya terkandung unsur dan nilai agama. Di dalamnya tersirat rasa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sangat meyakini keberadaan Allah SWT. Mati adalah fenomena yang dipandang secara *ber-trancendent*, sementara “*mati*” adat adalah fenomena yang berada dalam keupayaan manusia sebagai makhluk berakal. Pepatah-pepatah adat yang ada perlu diinterpretasikan untuk dapat difahami makna yang terkandung di dalamnya.

Fenomena penjajahan yang pernah dialami masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat Indonesia dan juga pada masyarakat Negeri Sembilan di Malaysia, telah menunjukkan terjadinya upaya mempertentangkan tradisional dengan moderen. Saat ini pun analisis dan tradisi mempertentangkan atau menjadikan dikotomi masih berlangsung. Persoalan lanjut adalah apakah masyarakat pendukung adat matrilineal Minangkabau akan menghilangkan nilai budaya yang dunia pun mengakui akan “kemegahan dan keunikannya”? Adakah masyarakat hukum adat Minangkabau di tanah Melayu akan menghilangkan dirinya dalam pergaulan dunia? Untuk ini Shamsul Amri (2007:254) mengungkapkan bahawa lebih baik melihat adat dan globalisasi sebagai dua fenomena sosial yang aktif, dinamik, dan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan masa. Lebih lanjut dinyatakan perlu memandang sebagai dua fenomena yang saling berinteraksi, yang satu merubah yang satu, kadang-kadang menguntungkan satu pihak dan pada ketika lain menguntungkan pihak yang lain. Hubungan ini jangan dipandang sebagai *zero-sum game*- hanya satu pihak saja yang menang dan yang satu lagi kalah dan terhapus.

PENUTUP

Migrasi atau perpindahan atau penghijrahan dalam konteks migrasi adalah suatu fenomena yang tidak bisa dielakkan. Fenomena ini ditimbulkan oleh *full* dan *push factor* yang akan selalu dihadapi manusia, baik secara perseorangan mahupun kelompok. Di samping itu pertambahan jumlah anggota kelompok dalam masyarakat akan ikut menentukan akan berpindah atau tidak. Itulah fenomena yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Minangkabau, sehingga sampai ke daerah penempatan baru yang kemudian lebih dikenal sebagai Negeri Sembilan.

Dalam proses perpindahan dan penempatan, serta pasca penempatan baru, transformasi nilai-nilai budaya yang telah dimiliki akan selalu berlangsung. Persoalan kemudian muncul adalah apakah nilai-nilai tersebut akan bertahan dan akan dipertahankan pada saat menghadapi nilai-nilai budaya “asing” yang juga diperkenalkan oleh penghijrah lain. Pada masyarakat hukum adat Minangkabau di daerah asal, terlihat ada di antara unsur-unsur kebudayaan yang mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan zaman, seperti terjadinya perubahan dan perkembangan nama-nama suku. Sementara bagi masyarakat di daerah rantau nilai-nilai tersebut dipertahankan dan dijadikan identitas bagi komunitasnya dalam pergaulan antara kerajaan-kerajaan negeri di Malaysia.

Untuk mencegah hilang atau habisnya nilai-nilai budaya yang dianggap sebagai nilai budaya bangsa atau suku bangsa yang dinyatakan bersifat tradisional yang dipertentangkan dengan nilai moderen di era globalisasi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan interaktif dan hubungan dialektik antara adat dan globalisasi. Pendekatan dan analisis yang digunakan ini diarahkan untuk menghindari kolonialisasi daripada kalangan yang menyatakan mempunyai moderen terhadap masyarakat lain yang “dituduh” mempunyai nilai “tradisional”.

NOTA AKHIR

- ¹ Kata “luhak” atau “luak” di samping bererti sumur juga bererti berlimpah (melimpah) dan juga diertikan “kurang” yang digunakan untuk menunjukkan bahawa telah melimpah (lah luhak) penduduk Pariangan dan pindah ke Tanah Datar, sehingga berkuranglah orang Pariangan karena melimpah (luhak) ke Tanah Datar.
- ² Laras berasal dari kata “lareh” (jatuh) sehingga laras di sini bererti “menjatuhkan”. Akhirnya kata “Laras”

digunakan untuk menunjukkan daerah atau tempat untuk menjatuhkan (memberlakukan) kata pilihan dan peraturan yang telah menjadi keputusan dari hasil mufakat. Dalam perkembangan masyarakat dan bentuk pemerintahan di Minangkabau, laras bererti sub distrik atau menjadi dasar pemerintahan menurut adat.

³ Terhadap penamaan Laras Koto Piliang ada juga pendapat yang menyatakan bahawa timbulnya nama tersebut kerana Datuk Ketumanggungan memilih koto-koto tempat “melaraskan” (menjatuhkan) peraturan-peraturan yang berasal daripada keputusan yang sudah dipilihnya bersama-sama dengan Ceti Bilang Pandai untuk memelihara kehidupan masyarakat.

⁴ Untuk hal ini perlu penelitian lebih mendalam.

RUJUKAN

- de Jong, P. E. J. 1971. *The Dynastic Myth of Negeri Sembilan*, Mimeograph.
- Kemal, Iskandar. 1966. *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Pakistan: Centre For Book Development in Asia.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Anthropotogi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mahmoed., St. & A. M. Rajo Panghulu. 1978. *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*.
- Maruhun, Dt. Batuah, A.M. & D. H. Bagindo Tanameh. t. th . *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Bandung: Poesaka Aseli.
- Mohd Shah bin Mohd Said al-Haj. 2000. *Tambo Alam Naning*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Naim Muchtar. 1986. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jogjakarta: Gajah Mada Press.
- Noorhalim Ibrahim. 2007. *Sejarah kewujudan adat perpatih*. Dlm. *Adat Perpatih: Esei Pilihan*. Kuala Lumpur: Jabatan Warisan Negara, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KEKKWA).
- Pound, R. 1986. *Interpretations of Legal History*. Florida: Sons. Inc., Holmes Beach.
- Radjab, M. 1969. *Sistem Kekeabatan di Minangkabau*. Padang: Center For Minangkabau Studies Press.
- Samad Idris, A. 1990. *Payung Terkembang*. Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Budiman.
- Shamsul Amri B. 2007. *Globalisasi dan Adat Perpatih: Satu Ulasan Kritis* Dlm. *Adat Perpatih: Esei Pilihan*. Kuala Lumpur: Jabatan Warisan Negara, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KEKKWA).
- Sweeney, S. 2011. *Pucuk Gunung Es: Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Kebudayaan Melayu-Indonesia*.
- Vollenhoven, C. van. 1925. *De Indonesier en Zijn Grond*. Leiden: E. J.Brill.
- Wernsy, G. H. 1736. *Malaische Spraakkunst*. Amserdam dalam Amin Sweeney, 2011:486. *Pucuk Gunung Es: Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Kebudayaan Melayu-Indonesia*.
- Wilkinson, R. J. 1971. *Papers on Malay Subjects*. Kuala Lumpur. Oxford University Press.
- Willinck. G. D. 1909. *Het Rechtsleven Bij De Minangkabausche Maleiers*. Leiden: Boekhandel en Drukkerij, Leiden.

Hermayulis
 Hernadewita
 Frengki Hardian
 Institut Alam dan Tamadun Melayu
 Universiti Kebangsaan Malaysia
 43600 UKM, Bangi
 Selangor
 E-mail: hermayulis@gmail.com

Diserahkan: 23 Disember 2014

Diterima: 8 April 2015